

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Konsep Politik Lingkungan

Dinamika lingkungan adalah sebagai produk saling penguatan dari banyak susunan yang saling berinteraksi dan proses dari pada lebih suatu desain. Dengan demikian, perbedaan yang fundamental antara tabiat manusia dan lingkungan bermakna bahwa pemahaman peran suatu masyarakat di dalam sistem lingkungan memerlukan bukan hanya pemahaman bagaimana masyarakat telah berbuat di masa lampau, tetapi juga apa yang mereka rencanakan untuk masa depan.<sup>16</sup>

Menurut Vandana Siva (1993), akar krisis ekologis terletak pada kelalaian pihak penguasa dalam menyingkirkan hak-hak komunitas lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam kebijakan lingkungan.<sup>17</sup> Peterson mengatakan bahwa politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di masyarakat

---

<sup>16</sup> Herman Hidayat. 2008. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia hal 9

<sup>17</sup> Umar Syadat Hasibuan. 2008. *Green Politics dan Penyelesaian Persoalan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Melalui <[http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=9104&coid=3&caid=31&gid=5](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=9104&coid=3&caid=31&gid=5)> (4 Januari 2019 pukul 19.39)

baik dalam skala individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan.<sup>18</sup>

Sementara menurut Bryant, politik lingkungan boleh di definisikan sebagai usaha untuk memahami sumber-sumber politik, kondisi dan menjadi suatu jaringan dari pergantian lingkungan. Bryant memusatkan kajian politik lingkungannya dengan meneliti operasional dalam pengelolaan hutan dalam kasus Indonesia.

Dari definisi diatas, jelaslah bahwa definisi Bryant yang menekankan bahwa politik hal yang pertama atas politik lingkungan, yang berbasis aspek pembangunan dan berwawasan lestari. Ada dua alasan rasional untuk kondisi ini. Pertama, bahwa tekanan politik dan ekonomi dari pemerintah Soeharto mewarnai secara mendalam dalam pengelolaan hutan sejak tiga dekade pemerintahannya (1966-1998). Kedua, implikasi dari tekanan politik dan ekonomi atas perspektif lingkungan telah diabaikan oleh birokrat kehutanan, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan hutan.<sup>19</sup>

Mengamati skala sosial lingkungan yang berbeda, politik lingkungan menjelaskan sekurangnya tiga penelitian area yang berbeda. Pertama, penelitian ke dalam sumber yang kontekstual perubahan lingkungan yang menguji pengaruh lingkungan secara umum pada suatu negara, hubungan antar negara, dan kapitalisme global. Judul ini merefleksikan pengaruh yang tumbuh dari kekuatan nasional dan transnasional atas lingkungan dari suatu dunia yang saling bertambah ketergantungan, baik secara

---

<sup>18</sup> Herman Hidayat. 2008. *Op.cit* hal 9

<sup>19</sup> *Ibid* hal 9

politik dan ekonomi. Kedua, area penelitian mencari tahu suatu lokasi dari aspek-aspek yang khusus mengenai perubahan lingkungan, yaitu dengan studi suatu konflik atas akses sumber-sumber lingkungan. Ilmuwan memperoleh pandangan bagaimana kontekstual pelaku berpengaruh atas kondisi sosio-lingkungan yang khusus, hubungan, dan menekankan perjuangan lokasi yang khusus atas lingkungan. Mengambil, baik sejarah maupun dinamika konflik, penelitian area ini menggambarkan bagaimana para petani yang miskin dan masyarakat lokal tanpa kekuasaan berperang melindungi fondasi lingkungan atas kehidupannya. Ketiga, penelitian area ini menjelaskan jaringan politik dari perubahan lingkungan atas hubungan sosio-ekonomi politik.<sup>20</sup>

Michael Watts berpendapat bahwa, *“Political ecology is the complex relations between nature and society through a careful analysis of what one might call the forms of access and control over resources and their implications for environmental health and sustainable livelihoods.”*<sup>21</sup>

Politik Lingkungan merupakan cara memahami hubungan kompleks antara alam dan masyarakat dengan analisis dari apa yang disebut bentuk akses dan kontrol atas sumber daya dan implikasinya terhadap kesehatan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan.

Kemudian menurut Lamont C. Hempel *Political Ecology*, *“the study of interdependence among political units and of interrelationships between political units and their environment, concerned with the political consequences of environmental change, with goals to explore*

---

<sup>20</sup> *Ibid* hal 10

<sup>21</sup> Paul Robbins, *Political Ecology: Second Edition*, (Oxford: John Wiley & Sons Ltd, 2012), hal 16

*community level and regional political action in the global sphere, in response to local and regional and scarcity.*"<sup>22</sup> Kajian tentang ketergantungan antara unit politik dan keterkaitan antara unit politik dengan lingkungan, yang berhubungan dengan konsekuensi politik dari perubahan lingkungan. Tujuannya untuk menggali dan menjelaskan tingkatan komunitas dan aksi politik regional dalam lingkup global, reaksi atas degradasi dan kelangkaan pada lokal dan regional.

*The study of human-environment interactions has a long history from different disciplines. Political Ecology (PE) is an emerging interinterdisciplinary approach to study human-environment interactions with a critical lens. In general, it is focused on how power inequalities relate to environmental changes, and to the distribution of their costs and benefits. A central feature of political ecology is the politicization of environmental problems. This means that environmental problems are seen as problems of distribution and the exercise of political and economic power, marked by conflicts over alternative futures and clashes between alternative values and imaginaries. Recognizing this means that environmental problems one has to attend to political and economic problems: problems of democracy, of economy, of ideology, etc.*<sup>23</sup>

Kajian mengenai interaksi manusia dan lingkungan memiliki sejarah panjang dari berbagai disiplin ilmu. Politik Lingkungan merupakan pendekatan interdisiplin untuk meneliti hubungan manusia dan lingkungan dengan kaca mata kritis. Pada umumnya, fokus pada ketidaksetaraan kekuasaan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, dan distribusi kerugian dan keuntungan. Karakteristik utama Politik Lingkungan adalah politisasi permasalahan lingkungan. Ini berarti bahwa permasalahan lingkungan dilihat sebagai permasalahan distribusi dan pelaksanaan kekuatan politik dan ekonomi, ditandai dengan permasalahan konflik atas alternatif masa depan dan perselisihan antara nilai

---

<sup>22</sup> Ibid hal 16

<sup>23</sup> Diego Andreucci, dkk., *Political Ecology for Civi Society*, (ENTITLE-European Network of Political Ecology, 2016) diunduh pada 10 Februari 2019 dari <http://www.politicaecology.eu/documents/events/94-entitle-manual-may-2016/file>, hal 5

alternatif dan imajinasi, Menyadari hal ini berarti bahwa lingkungan merupakan satu yang harus dihadapi politik dan ekonomi: masalah demokrasi, ekonomi, ideologi, dan sebagainya.

Lingkungan memiliki sejumlah karakteristik khas yang idealnya dapat dijadikan titik rujuk bagi politik sebagai instrumen pengaturan kepentingan bersama. Tiga karakteristik dasar lingkungan bisa diidentifikasi.<sup>24</sup> *Pertama*, watak lingkungan sebagai sebuah kesatuan sistem melintasi sekat-sekat administrasi pemerintahan dan politik. lingkungan tidak pernah setia pada dan tidak pernah bisa dipagari oleh ruang yang diciptakan melalui politik. Ia melintasi batas-batas negara, mengabaikan konseptualisasi tentang “kedaulatan” sebagai titik pijak dalam pemaknaan atas negara modern. Sifat lingkungan juga pernah setia pada dan tidak dapat dipagari oleh batas batas administrasi pemerintahan apapun pola peraturannya.

*Kedua*, lingkungan melekat di dalamnya kepentingan paling subyektif dari manusia sebagai makhluk, terlepas dari ruang politik dan terbebas dari penjara waktu. Setiap individu, membutuhkan lingkungan sebagai ruang kebutuhan hari ini yang tak bisa ditunda pemenuhannya dan sekaligus ruang kebutuhan masa depan yang tak dapat dipercepat. Lingkungan adalah ruang kita sebagai makhluk manusia bukan saja sebagai ruang hari ini, tapi sekaligus sebagai ruang masa depan diri dan anak keturunan kita. Dalam konteks ini, lingkungan memiliki variasi makna, mulai dari posisinya sebagai ruang ekonomi, ruang kultural, bahkan hingga pada ruang dalam makna fisikalnya.

---

<sup>24</sup> Cornelis Lay, (2007), *Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik vol. 11 nomor 2. UGM Yogyakarta. Hal 156-157

*Ketiga*, daya menghukum lingkungan yang timbul sebagai akibat dari pengabaian manusia atas lingkungan punya sifat yang sangat khas, yakni indiskriminatif. Berbagai bencana kita perlakukan lingkungan secara wajar akan melanda siapa saja tanpa mempedulikan kelas sosial, kekayaan asal-usul, agama dan berbagai kategori pembeda manusia lainnya.

## **2. Teori Analisis Kebijakan Publik**

Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut betapa pun tetap tidak lengkap kecuali jika hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analis berkewajiban melayaninya. Hanya jika pengetahuan tentang kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota-anggota badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan dalam keputusan-keputusan publik, dapat menggunakan hasil-hasil analisis kebijakan untuk membuat kebijakan dan kinerjanya. Karena efektivitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap stok pengetahuan yang tersedia. Komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktik dan teori pembuatan kebijakan publik.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> William N. Dunn, (2003), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal 1-2

Menurut E.S. Quade (Alm), mantan kepala Departemen Matematika di perusahaan Rand, mendefinisikan analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan, dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum; termasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahkannya ke dalam sejumlah komponen-komponen tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif-alternatif baru. Kegiatan-kegiatan yang mencakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap. Beberapa analisis kebijakan bersifat informal, meliputi tidak lebih dari proses berfikir yang keras dan cermat, sementara lainnya memerlukan pengumpulan data yang ekstensif dan perhitungan yang teliti dengan menggunakan proses matematis yang canggih.<sup>26</sup>

Analisis kebijakan menggunakan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan.<sup>27</sup>

Masalah kebijakan (*policy problem*) adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik; Masa depan

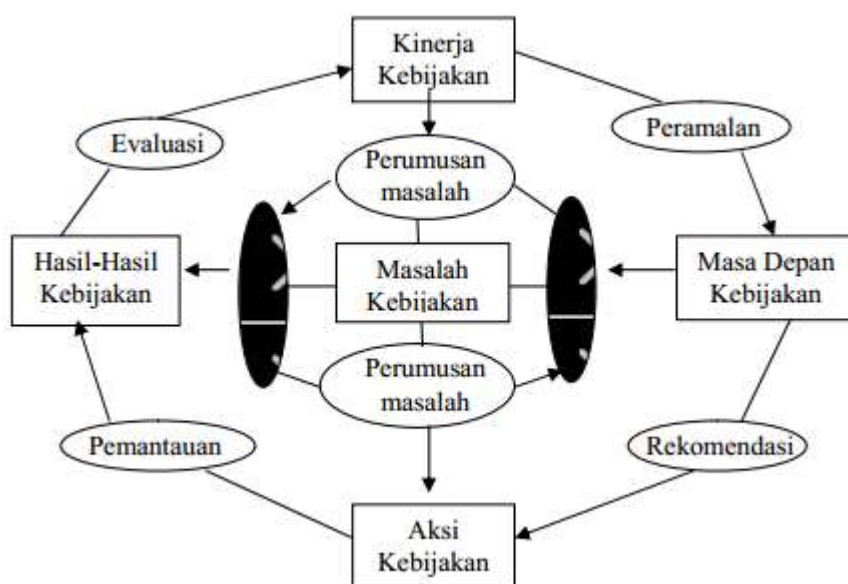
---

<sup>26</sup> *Ibid* hal 95-96

<sup>27</sup> *Ibid* hal 107

Kebijakan (*policy future*) adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk pencapaian nilai-nilai dan karena itu merupakan penyesuaian terhadap suatu masalah kebijakan; Aksi kebijakan (*policy action*) adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan yang dituntun oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil di masa depan yang bernilai; Hasil kebijakan (*policy outcome*) merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan. Konsekuensi dari aksi kebijakan tidak dapat secara penuh dinyatakan atau diketahui ketika tindakan-tindakan sedang berjalan juga tidak semua konsekuensi tindakan yang teramati diinginkan atau terantisipasi; Kinerja kebijakan (*policy performance*) merupakan derajat dimana hasil kebijakan yang ada, memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai.<sup>28</sup>

**Gambar 2.1 Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah**



Sumber: William N. Dunn, (2003), Pengantar Analisis Kebijakan Publik,  
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal 112

<sup>28</sup> *Ibid* hal 108-109



Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses pengkajian yang meliputi lima komponen informasi kebijakan yang di transformasikan dari satu kesatu lainnya dengan menggunakan lima prosedur analisis kebijakan (*policy-analytic procedures*) seperti digambarkan dalam kerangka kerja yang disajikan dalam gambar 2.1. seluruh komponen dan metode-metode dalam kerangka kerja ini digunakan untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi tersebut. Penggunaan prosedur analisis kebijakan (seperti perumusan masalah, peramalan, pemantauan, evaluasi, rekomendasi) memungkinkan analisis mentransformasikan satu tipe informasi ke informasi lainnya. Informasi dan prosedur bersifat saling tergantung; mereka terkait dalam proses dinamis transformasi informasi kebijakan. Oleh karena itu komponen-komponen informasi-kebijakan (seperti masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, kinerja kebijakan) ditransformasikan dari satu kesatu lainnya dengan menggunakan prosedur analisis kebijakan. Seluruh proses diatur melalui perumusan masalah yang diletakan pada pusat kerangka kerja.<sup>29</sup>

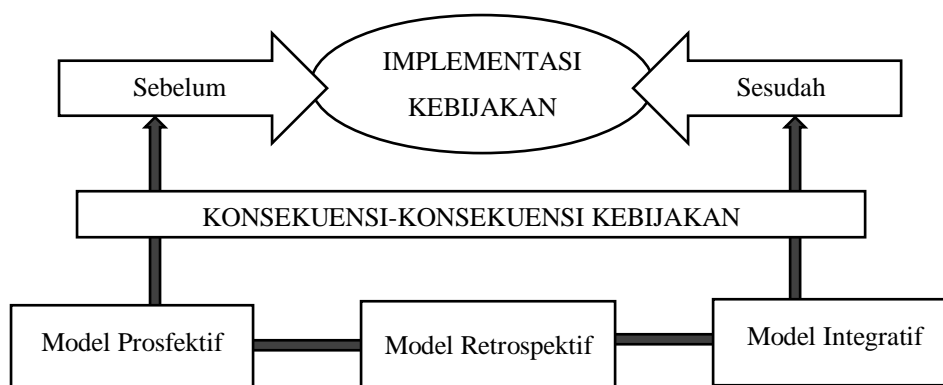
Menurut Dunn dalam Edi Suharto ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu prospektif, model retrospektif dan model integratif.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid* hal 112-113

<sup>30</sup> Edi Suharto, (2015), *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta. hal 86

**Gambar 2.2 Model Analisis Kebijakan**



Sumber: Edi Suharto, (2015), *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta. hal 82

- a. Model Prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan ‘sebelum’ suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (*forecasting*) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan.
- b. Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan ‘setelah’ suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
- c. Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model diatas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik ‘sebelum’ maupun ‘sesudah’ suatu kebijakan dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

Meter dan Horn (1979) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: *“policy implementation encompasses those action by public and provate individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set fourh in prior policy decisions”*. Definisi tersebut memberi makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.<sup>31</sup>

Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar. Dalam hal ini, dapat berupa undang-undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting, ataupun keputusan badan peradilan. Konten dan konteks didalamnya, berupa identifikasi masalah yang hendak dicapai dengan melalui berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.<sup>32</sup>

Adapun tahapan-tahapan dalam proses implementasi yaitu:

- a. Output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan pelaksana;
- b. Kepatuhan dari kelompok sasaran terhadap keputusan dimaksud;
- c. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana;
- d. Persepsi terhadap dampak keputusan dimaksud;

---

<sup>31</sup> *Ibid hal 82*

<sup>32</sup> *Ibid hal 83*

- e. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang yakni berupa perbaikan mendasar dari kontennya

Implementasi suatu kebijakan, didalamnya akan selalu mengandung resiko untuk gagal. Disini, ukuran kegagalan implementasi tentunya dengan melihat kembali, apa sebenarnya dampak yang dipersepsikan oleh para pembuat kebijakan. Dengan melihat kembali dampak tersebut, diperoleh pengetahuan seberapa jauh rentang biasanya. Rentang bias ini, sangat tergantung kepada kemampuan pejabat pelaksanaan (*implementation capacity*). Asumsi yang dapat dikemukakan telah semakin memadai *implementation capacity* maka semakin kecil *implementation gap*.<sup>33</sup>

Model implementasi kebijakan negara menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, merupakan model yang seringkali disebut dengan *the top down approach*. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (*perfect implementation*) yang memerlukan beberapa persyaratan tertentu yaitu:<sup>34</sup>

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius;
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausalitas yang handal;

---

<sup>33</sup> Ibid hal 84

<sup>34</sup> Ibid hal 95-96

- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut kepatuhan yang sempurna.

Menurut Aderson (1979), faktor-faktor yang menyebabkan orang tidak mematuhi dan melaksanakan kebijakan negara disebabkan oleh:

- a. Kebijakan bertentangan dengan sistem nilai masyarakat;
- b. Adanya konsep ketidakpastian selektif terhadap hukum;
- c. Keanggotaan seseorang dalam suatu perkumpulan atau kelompok;
- d. Keinginan untuk mencari untung dengan cepat;
- e. Adanya ketidakpastian hukum.

Dunn dan Ripley dalam Wibawa (1994: 10) menyatakan bahwa fungsi dari evaluasi kebijakan terdiri sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. *Ekzplanasi*. Melalui evaluasi kebijakan maka dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realita;
- b. *Kepatuhan*. Melalui evaluasi kebijakan maka dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi

---

<sup>35</sup> Ibid hal 110

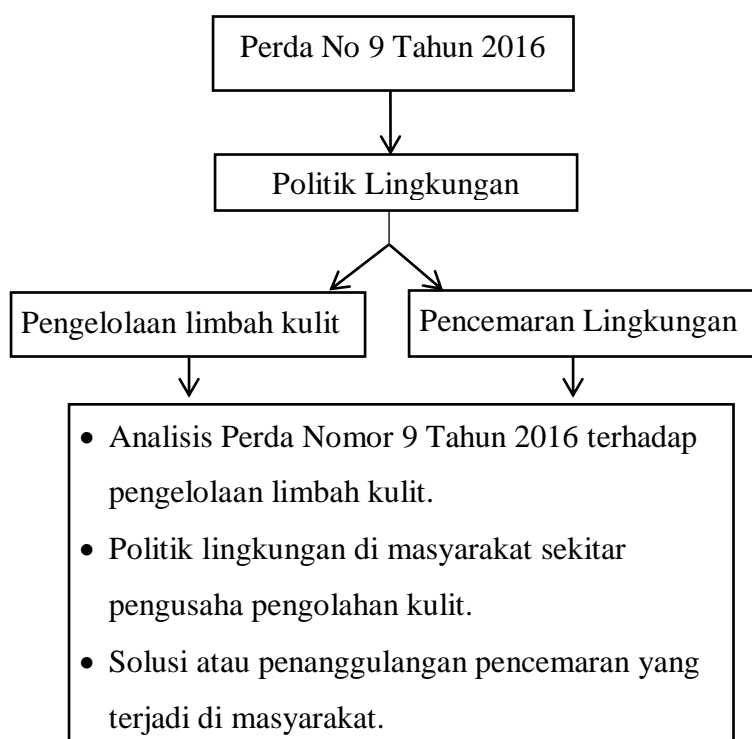
maupun pelaku lain sesuai dengan standar maupun prosedur yang telah ditetapkan;

c. *Auditing*. Melalui kebijakan maka dapat diketahui apakah output benar-benar telah sampai pada kelompok sasaran maupun penerima lain;

d. *Akunting*. Melalui evaluasi kebijakan maka dapat diketahui apakah sosial ekonomi dari kebijakan tersebut meningkat atau tidak.

## B. Kerangka Pemikiran

**Gambar. 2.3 Kerangka Pemikiran**



Kebijakan mengenai pencemaran lingkungan hidup sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup disebabkan oleh tata nilai yang

berlaku menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Nilai dari segala sesuatu yang ada di alam semesta dilihat dari sudut pandang kepentingan manusia.<sup>36</sup> Dengan demikian sekarang ini lingkungan hidup perlu dimanfaatkan dan dilindungi semata-mata hanya untuk kepentingan manusia.

Karena pada dasarnya kebijakan merupakan sebuah bentuk pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang lingkungan hidup baik yang berhubungan dengan alam ataupun manusia, harus benar-benar terimplementasikan supaya tidak ada tindakan-tindakan merusak lingkungan yang berdampak buruk khususnya bagi masyarakat, serta memberikan perlindungan apabila tindakan-tindakan tersebut sudah dilakukan.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai politik lingkungan dan kebijakan, dengan penelitian-penelitian sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 7

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p><b>Eko Aji Wahyudin (2018), GERAKAN SOSIAL BARU DAN POLITIK LINGKUNGAN (Studi Atas Kontribusi WALHI Terhadap Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta 2004-2017).</b></p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini khususnya dilihat dari dimensi Politik Lingkungan terfokus pada kajian aktor, WALHI dilihat sebagai Aktor Tidak Langsung, karena Aktor Langsung yang merupakan pemberi pengaruh utama terhadap lingkungan yakni aktor negara atau pemerintah. Sebagai 116 Aktor Tidak Langsung, WALHI memiliki peran menjadi pihak yang berada di luar pemerintahan, sebagai pengamat yang kritis, juga memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya isu Lingkungan dan kesadaran atas masalah lingkungan seperti banjir, polusi udara dan krisis air yang</p>	<p>Dalam penelitian ini terlihat bahwa salah satu pendekatan dari politik lingkungan menjadi acuan dalam kasus yang sedang diteliti, hal ini menjadi persamaan sekaligus acuan dari penelitian yang penulis buat khususnya dalam kajian politik lingkungan.</p>	<p>Meskipun teori yang digunakan sama namun fokus penelitian ini berbeda, penelitian ini membahas mengenai aktor langsung dan tidak langsung yang merupakan bagian dari teori politik lingkungan. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada politik lingkungan pengelolaan limbah berdasarkan kebijakan mengenai lingkungan hidup yang terdapat pada UU No 32 tahun</p>



	disinyalir salah satu akibatnya karena minim RTH.		2009.
<b>Hans Ivander Joy Simanungkalit (2015),</b> POLITIK LINGKUNGAN Analisis Dampak Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu.	Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat empat dampak pengusahaan sarang burung walet di Kota Rantauprapat. Pertama, dampaknya terhadap tata ruang perkotaan Kota Rantauprapat. Melalui dokumen hasil rencana tata ruang perkotaan Kota Rantauprapat, tidak ada bentuk pengalokasian terhadap kegiatan ini di Rantauprapat. Artinya, kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang perkotaan Rantauprapat yang sudah	Dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan dan politik lingkungan, hal ini menjadi acuan penulis karena teori tersebut sama sama digunakan pada penelitian penulis, dengan demikian pengaplikasian teori dalam penelitian ini khususnya pada pembahasan menjadi acuan penulis.	Penelitian ini menggunakan teori politik lingkungan, kebijakan, dan teori ekonomi politik, fokus pada penelitian ini yaitu lebih kepada ekonomi politik karena dalam pembahasan penelitian ini membahas mengenai pengelolaan tata ruang serta pengalokasian kegiatan yang merugikan masyarakat sekitar serta pemerintahan lokal.

	diproyeksikan sebagai pusat perkotaan yang diharapkan dapat mewujudkan kondisi lingkungan perkotaan yang kondusif.		
<b>Oki Oktami Yuda &amp; Eko Priyo Purnomo (2018), Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017.</b>	Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diketahui implementasi kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada tahun 2017 terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat capaian kinerja yang hampir memenuhi target capaian kinerja, penggunaan	Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian pencemaran hal ini menjadi acuan penulis karena implementasi kebijakan merupakan dari teori kebijakan publik yang penulis gunakan, dengan beberapa bersamaan pada penelitian ini maka penelitian ini menjadi acuan bagi	Dalam penelitian ini hanya terfokus pada implementasi kebijakan saja terhadap pengendalian pencemaran, dan tidak menggunakan teori politik lingkungan yang menjadi acuan dari penelitian ini, dengan demikian meskipun berbeda penelitian ini cukup berguna bagi penulis.

	<p>anggaran yang efisien, sarana dan prasarana yang sudah mencukupi untuk operasional, kejelasan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kebijakan, adanya tekanan yang bersifat dorongan dari lembaga swadaya masyarakat terhadap isu isu limbah cair yang kemudian disampaikan kepada birokrasi, komunikasi yang informatif kepada pihak hotel dalam urusan hak dan kewajiban pihak hotel terutama masalah limbah cair.</p>	<p>penulis.</p>	
--	--	-----------------	--